

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mengerjakan salah satu dari dua hal, yaitu melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang menyalurkan tabungan sebagian masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan dan pinjaman kepada pihak lain dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman yang berupa bunga sebagai pendapatan bank yang bersangkutan.

Umumnya suatu perusahaan perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas yang dilakukannya. Perusahaan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan sehingga para pengelola akan dihadapkan pada tuntutan terhadap penguasaan pengetahuan, teknologi, keterampilan dan kemampuan manajemen.

Seiring dengan perkembangan skala usaha dalam suatu perusahaan, pemimpin perusahaan tidak mungkin untuk bisa melakukan pengawasan atas semua operasi perusahaan secara langsung atau dengan kata lain pemilik tidak mungkin bisa terlibat langsung dalam operasi perusahaannya. Untuk itu pemimpin perusahaan perlu mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen perusahaan dan manajemen meneruskan kembali wewenang tersebut. Dengan demikian diperlukan adanya suatu

sistem yang memadai yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi perusahaan. Sistem tersebut dikenal dengan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh pihak didalam maupun diluar perusahaan.

Dengan adanya sistem pengendalian intern ini tidak dimaksudkan bahwa penyimpangan dan penyelewengan sama sekali tidak akan terjadi. Akan tetapi diharapkan dapat menekan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang tepat oleh pihak manajemen perusahaan.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 Sidikalang merupakan perusahaan jasa perbankan / keuangan yang sumber utama pendapatan perusahaan, berasal dari penghimpunan dana / kas dari masyarakat (Deposito, Tabungan, Setoran Angsuran kredit dan Hutang-hutang lainnya).Setiap perusahaan yang berbentuk lembaga keuangan selalu berusaha menerapkan struktur pengawasan terhadap kas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan apabila terjadi penyimpangan dapat diambil tindakan yang diperlukan. Efisien, efektivitas, dan produktivitas usahapun dapat ditingkatkan dengan penerapan sistem pengendalian yang baik.Semakin baik sistem pengendalian pada suatu bank maka semakin sedikit pula kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank.

Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 Sidikalang transaksi pengeluaran kas sangat banyak, salah satunya adalah penyaluran kredit. Namun dalam penyaluran kredit bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah karena proses pemberian kredit tersebut akan menentukan kualitas kredit itu sendiri, dan kesalahan dalam pemberian kredit akan memperbesar resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan/dijadwalkan yang menjadikan terjadinya kredit macet,

Perangkat pengendalian canggih atau dengan disusunnya sistem yang terbaik sekalipun belum tentu mampu menghindarkan kesalahan dan mencegah terjadinya kredit macet jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk melakukan suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut tidak berguna lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. BPR NBP 8 Sidikalang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengingat betapa luasnya masalah yang timbul, maka pada tahapan pembahasan penulis mencoba menguraikan pokok permasalahan yang mempunyai hubungan dengan pengendalian intern pengeluaran kas sehingga mendapatkan hasil

yang merupakan gambaran yang secara menyeluruh tentang permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada PT. BPR NBP 8 Sidikalang.

### **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada PT. BPR NBP 8 SIDIKALANG.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem akuntansi pada suatu perusahaan.
2. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan dapat menjadi masukan mengenai tindakan system pengendalian intern pengeluaran kas.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak akademisi yakni memberikan wawasan yang baru mengenai sistem akuntansi

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Perbankan**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mengerjakan salah satu dari dua hal, yaitu melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang menyalurkan tabungan sebagian masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan pada setiap negara, bank sebagai lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan badan pemerintah dan swasta maupun perorangan untuk berinvestasi serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor. Bank juga berperan sebagai pemasok dari sebagian besar uang yang beredar digunakan sebagai alat pembayaran sehingga kebijaksanaan moneter dapat berjalan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan untuk membantu dalam pemabangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan pengertian tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

### **2.1.1 Bank**

**Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya<sup>1</sup>.**

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Bank sangat erat kaitannya dengan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktifitas keuangan masyarakat, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bank berfungsi sebagai .

#### **1. Pedagang Dana (Money Leader)**

Merupakan wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan kepada setiap penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka kertas tanda bukti kredit/pembelian surat berharga.

#### **2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.**

---

<sup>1</sup>Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lain jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya. Bank dalam kedudukannya sebagai lembaga keuangan dalam tugasnya tidak bertyindak sendiri tetapi dibina dan diawasi oleh Bank Sentral.

### **2.1.3 Jenis-jenis Bank di Indonesia**

Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 jenis bank dibagi 2 macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian dari kedua jenis bank tercantum dalam pasal ayat (1) dan (2) yaitu : “Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Pembagian di atas hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, dan jasa untuk memperjelas ruang lingkup dan ruang kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Apabila dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya, maka terdapat empat jenis bank, yaitu :

#### **1. Bank Sentral (Central Bank)**

Bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

#### **2. Bank Umum (Commersial Bank)**

Yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahannya terutama memberikkan kredit jangka pendek. Disebut bank umum karena bank tersebut dalam memperoleh keuntungan adalah dari selisih bunga (spread) yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor.

### 3. Bank Tabungan (Saving Bank)

Yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbanyak dana dengan kertas berharga.

### 4. Bank Tabungan (Development Bank)

Yaitu bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama, menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

Dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Bank milik Negara
2. Bank milik Pemerintah Daerah
3. Bank milik Swasta baik dalam negeri maupun asing.
4. Bank Koperasi

Sedangkan bila dilihat dari penciptaan uang giral terdapat dua jenis bank yaitu:

1. Bank Primer



Yaitu dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada dalam bentuk giro.

## 2. Bank Sekunder

Yaitu bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam masyarakat yang mengajukan kredit.

**Setelah keluar Undang-undang pokok perbankan No.7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI No.10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:**

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)<sup>2</sup>

### **2.1.4 Bank Perkreditan Rakyat**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah terutama perekonomian, pemerintah daerah berupaya membentuk suatu lembaga kredit kecamatan dengan harapan dapat meningkatkan laju pembangunan ekonomi lemah yang disebut Bank Kredit Kecamatan.

**Dalam Buku Ali Suyanto pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan**

---

<sup>2</sup>Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012

**usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>3</sup>.**

Sedangkan menurut Undang-undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan dan pinjaman kepada pihak lain dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman yang berupa bunga sebagai pendapatan bank yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Bank Perkreditan Rakyat adalah merupakan bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan tabungan serta pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan harapan bank akan memperoleh tambahan nilai yang berupa bunga sebagai pendapatan bank. Lembaga perkreditan ini dibentuk oleh Badan Usaha Daerah yang pertanggungjawaban pengelolaannya disetiap wilayah kabupaten Daerah Tingkat II diserahkan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan. Tujuan yang ingin dicapai dengan didirikan Bank Perkreditan Rakyat adalah:

1. Menunjang kelancaran sarana produksi terutama permodalan dalam rangka pembangunan daerah.
2. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha segolongan ekonomi lemah di pedesaan dan menciptakan lapangan kerja secara langsung
3. Meningkatkan produktifitas dalam rangka peningkatan produksi dibidang pertanian dan perdagangan.

---

<sup>3</sup>Ali Suyanto Herli, Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2013

4. Melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.
5. Meningkatkan pendapatan secara nyata bagi petani dan pedagang.
6. Meningkatkan taraf hidup dengan jalan memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan petani dari pengaruh yang merugikan, membentuk modal masyarakat dengan mengadakan pinjaman wajib.

Sedangkan menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Bank Kredit Kecamatan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah pada masyarakat pedesaan.
2. Menunjang kelancaran penyediaan sarana pernodalan untuk kegiatan produktif.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendidik masyarakat untuk gemar menabung;
4. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi nasional.
5. Membimbing para nasabah atau pengusaha kecil untuk merasa ikut handarbeni atas lembaga perkreditan pedesaan yang ada.
6. Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hiduf masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit dibidang usahanya. Dalam menjalankan

usahanya sebuah perusahaan ataupun entitas memerlukan suntikan modal guna pengembangan, sumber-sumber dana atau modal guna pengembangan usahanya, sumber-sumber dana atau modal itu biasanya dari pemilik atau pinjaman dari pihak tiga.

**Dalam mengalokasikan kredit BPR kepada calon debitur ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:**

- 1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian**
- 2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut.**
- 3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga), anggota Dewan Komisaris lain, serta perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga), anggota Dewan Komisaris (dan keluarga), anggota Direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya<sup>4</sup>.**

## **2.2 Pengertian Kas**

Kas adalah modal kerja yang sifatnya sangat liquid (lancar). Semakin besar jumlah nominal kas yang terdapat pada suatu perusahaan artinya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Dalam akuntansi, kas diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar. Kas dianggap sebagai salah satu unsur modal kerja yang paling banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm 5

**Menurut Soemarso kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Termasuk sebagai kas adalah rekening giro di bank dan uang kas yang ada di perusahaan.<sup>5</sup>**

Kas sebagai bagian dari sistem transaksi, memiliki cirri-ciriumum yang membedakannya dengan sistem transaksi lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Bersifat lancar, mudah, dan bisa cepat diuangkan
- b. Memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga bisa dipakai untuk alat bayar di bank atau perusahaan
- c. Dapat direncanakan pengeluaran dan penerimaannya, serta dikendalikan oleh perusahaan yang berkaitan

## **2.3 Sistem Pengendalian Intern**

### **2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Pengawasan intern (AICPA / *American Institute of Certified Public Accountants*) dalam arti luas yaitu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

---

<sup>5</sup>Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi 5, Jakarta, 2002

**Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen<sup>6</sup>.**

Menurut Anastasia Diana **“Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan<sup>7</sup>.**

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan pengendalian intern yaitu: **“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan laporan keuangan, (b) Efektivitas dan Efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”<sup>8</sup>.**

Menurut Dasaratha V. Rama, Mengemukakan bahwa: **“Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran dan kategori sebagai berikut: Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku”<sup>9</sup>.**

Pengendalian intern mempunyai arti yang sempit maupun luas. Adapun dalam arti sempit pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan baik penjumlahan secara mendatar maupun menurun. Sedangkan dalam arti luas pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan saja tetapi juga meliputi semua perangkat

---

<sup>6</sup>Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-3. Jakarta : Salemba Empat, hlm 163

<sup>7</sup>Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Andi: Yogyakarta

<sup>8</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Profesional Akuntan Publik**, Cetakan pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2011, PSA No. 69, Paragraf 06, Seksi 319

<sup>9</sup> Darasatha V. Rama., at, al., *Accounting Information System, Sistem informasi Akuntansi*, Alih bahasa: M. Slamet Wibowo, Buku Satu: Salemba Empat, Jakarta, 2009, Ha 132

dan alat- alat yang digunakan dalam manajemen perusahaan untuk mengadakan atau melakukan pengawasan.

Defenisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar yaitu bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat serta pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

Melalui pengawasan intern pimpinan pusat menilai struktur organisasi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Romney dan Steinbert: **“Pengendalian Internal (*Internal Control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai unyuk tujuan: Mengamankan aset, mengelola catatan dengan detail, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, mrnyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku”**.<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern dapat dikelompokkan kedalam pengawasan administrative dan pengawasan

---

<sup>10</sup> Marshall B. Romney dan Paul Jhon Steinbert, *Accounting Information System* ,Edisi 13, **Sistem Informasi Akuntansi**, Alih Bahasa : Kikin Sakinah & Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta, 2015, Hal 226

akuntansi. Pengawasan administrative terdiri dari struktur organisasi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen dan biasanya hanya mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan catatan finansial.

Pengendalian intern sebagai suatu proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai, yang dirancang untuk menghadapi risiko-risiko, serta memberikan keyakinan memadai untuk mencapai misi dengan mencapai tujuan-tujuan umum, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib, etis, ekonomis, efisien, dan efektif;
2. Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan handal;
3. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengamankan sumber daya dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan aset.

### **2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan atau lembaga, dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan atau lembaga sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pengendalian intern disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.



Dengan demikian dapat dilihat bahwa tujuan pengendalian intern adalah :

1. Mengamankan aktiva
2. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan
3. Meningkatkan efisiensi operasi
4. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.

Ada tiga tujuan sistem pengendalian Internal yaitu:

1. Aset dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
2. Informasi bisnis akurat
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan

### **2.3.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akutansi, **unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern meliputi empat unsur besar yang tiap pointnya tidak dapat dipisahkan, keempat unsur tersebut adalah:**

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**

**Prinsip pembagiannya adalah harus di pisahkan menurut fungsi-fungsi operasi, penyimpanan dan fungsi Akutansi. Struktur organisasi harus dapat menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi.**

**Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat *internal check* di antara unit organisasi pelaksana. Dengan pemisahan ketiga fungsi tersebut dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Bahwa**

setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi merupakan transaksi yang sebenarnya terjadi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, pendapatan dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Carannya yaitu dengan penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus di pertanggung jawabkan oleh yang berwenang, setiap transaksi tidak boleh di laksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau unit organisasi lain, pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur, perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat terhindar.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Karyawan yang sesuai dengan mutu sekarang ini jarang dicari oleh perusahaan karena perusahaan sering mementingkan atau merekrut karyawan yang dapat digaji dengan rendah, ini menimbulkan adanya cara kerja yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Untuk memperoleh karyawan yang baik dapat ditempuh dengan dua cara yaitu seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya kemudian harus adanya pengembangan pendidikan karyawan selain menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.<sup>11</sup>

## 2.4 Sistem Pengeluaran Kas

Sistem pengeluaran kas ada dua macam yaitu pengeluaran kas dengan cek dan pengeluaran kas dengan uang tunai. Sedangkan Sistem pengeluaran kas merupakan sistem yang dirancang untuk menangani transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas yang terjadi secara rutin pada suatu perusahaan.

Pengeluaran uang kas dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar berbagai macam transaksi. Apabila pengeluaran kas tidak dijalankandenganketat, makaseringkali jumlah pengeluarandiperbesar

---

<sup>11</sup>Op Cit, Mulyadi, 2008:164

danselisihnyadigelapkan.

Beberapaprosedurpengendalianinternkasyangharusdiperhatikann adalahsebagaiberikut:

1. Semua pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali untukpengeluaran-pengeluarandarikaskecil.
2. Dibentukkaskecilyangdapatdiawasidenganketat
3. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkapataudengankatalaindenganmenggunakansystemvoucher.
4. Dipisahkan antara orang-orang yng mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek, yng menandatangani cek dan yang mencatatpengeluarancek.
5. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang berubah-ubah.
6. Diharuskanmembuatlaporankasharian.

Dengan diterapkannya beberapa prosedur pengendalian dalam pengeluaran kas diatas, diharapkan akan meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi.<sup>12</sup>

## 2.5 Pengendalian intern kas

Suatu pembayaran dapat dilaksanakan apabila telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, lengkap, dan melalui otorisasi yang telah ditetapkan. Pembayaran- pembayaran akan dikatakan tepat apabila dilakukan tepat pada waktunya.

Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian pengeluaran kas yang baik, **prosedur pengawasan pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

1. Semua pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil, dapat dibayar dengan kas kecil.
2. Dibetuk kas kecil yang diawasi dengan ketat.
3. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher.

---

<sup>12</sup>Ibid, Mulyadi,2008:509

4. **Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan mencatat pengeluaran kas.**
5. **Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu.**
6. **Diharuskan membuat lapran kas harian.**<sup>13</sup>

Prosedur pengeluaran kas merupakan pengeluaran untuk melunasi hutang yang sudah disetujui dan mencatat pengeluaran tersebut. Adapun sumber- sumber pengeluaran kas yang utama adalah:

1. Berbagai pembayaran untuk keperluan perusahaan sehari- hari
2. Pembayaran kepada debitur.
3. Penambahan berbagai aktiva tetap perusahaan.
4. Pembayaran kepada pemilik modal.
5. Pembayaran kepada pemerintah seperti pajak,cukai,dan lain- lain.

### **2.5.1 Unsur- Unsur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas**

Setiap pengendalian Intern tidak mempunyai bentuk standar yang dapat diterapkan secara efektif pada setiap perusahaan. Pada suatu system pengendalian intern yang baik bagi suatu perusahaan belum tentu akan berhasil dengan baik bila diterapkan pada perusahaan lainnya, karena masing- masing perusahaan mempunyai ruang lingkup dan sifat yang berbeda.

Untuk membentuk suatu sistem pengendalian intern yang baik haruslah meliputi berbagai unsure yang saling berkaitan dan harus dipatuhi, serta berlaku

---

<sup>13</sup>Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, Edisi Kedelapan: BPFE, Yogyakarta, 2008

umum dalam perusahaan untuk setiap fungsi yang merupakan bagian dari pengendalian itu sendiri yang mana setidaknya- tidaknya tidak terdapat penggabungan fungsi yang tidak boleh disatukan antara orang yang memegang dan yang mencatat kas.

Menurut Mulyadi unsur- unsur pengendalian intern pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

- a. **Organisasi**
  - 1) **Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi**
  - 2) **Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain.**
- b. **Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan**
  - 1) **Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.**
  - 2) **Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.**
  - 3) **Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.**
- c. **Praktik yang Sehat**
  - 1) **Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.**
  - 2) **Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap “lunas” oleh Bagian Kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.**
  - 3) **Penggunaan rekening Koran bank (bank statement), yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.**
  - 4) **Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan.**
  - 5) **Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan system akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan *imprest system*.**

- 6) Secara periodic diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada diperjalanan (cash in transit) diasuransikan dari kerugian.
- 7) Kasir diasuransikan (*fidelity bond insurance*)
- 8) Kasir dilengkapi dengan alat- alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan.
- 9) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh Kasa<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Op.Cit.,Mulyadi,hal 517

### **BAB III**

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR NBP 8 SIDIKALANG yang beralokasi di Jl. Sisingamangaraja No.259 Sidikalang Kab.Dairi, dengan pembahasan mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas.Penelitian ini dibatasi hanya dengan menganalisis sistem pengendalian intern pengeluaran kas atas penyaluran kredit kepada nasabah.

### 3.2 Data Penelitian

#### a. Data Sekunder

Didalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan.Adapun data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejarah singkat PT. BPR NBP 8 SIDIKALANG
2. Struktur organisasi PT. BPR NBP 8 SIDIKALANG
3. Pedoman prosedur pengendalian intern pengeluaran kas PT. BPR NBP 8 SIDIKALANG
4. Data penyaluran kredit 3 tahun terakhir
5. Dokumen persyaratan penyaluran kredit

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang paling strategis dalam melakukan penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data. **Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di**



**jalan ,dll. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer,dan sumber sekunder<sup>15</sup>.**

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan datanya maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar untuk melakukan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi . Teknik dokumentasi digunakan pada saat mengoleksi data tentang laporan, dokumen atau catatan-catatan serta formulir-formulir dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 8 Sidikalang

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara antara lain:

a. Interview (Wawancara)

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan di PT. BPR NBP 8 Sidikalang, Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antarlain Kepala bagian kredit, Account officer, dan Satuan Pengawasan Intern Kredit. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam buku Abdurrahmat Fathoni (2006)dikemukakan bahwa **“wawancara tidak berstruktur ialah wawancara tidak berstandar yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan.”<sup>16</sup>**

b. Observasi

Yaitu dengan pelaksanaan suatu studi pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengambilan data dari laporan-laporan atau arsip perusahaan yang sudah diolah sebelumnya oleh petugas perusahaan.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta: Bandung, 2016

<sup>16</sup>Abdurrahmat Fathoni, 2006, Metode penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Metode analisis dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data, akannampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah

#### **1. Metode Analisis Deskriptif**

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### **2. Metode Analisis Deduktif**

Metode analisis dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan teori-teori akuntansi dengan kenyataan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dari hasil perbandingan tersebut ditarik beberapa kesimpulan sebagai dasar untuk memberikan saran- saran.